
**PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA DALAM PENGELOLAAN
ASET DESA**
(Studi di Desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah dan Desa Lingsar Kec. Lingsar
Kab. Lombok Barat)

Oleh
Abdul Manan
Widyaiswara Ahli Muda
Email: dollemanani123@gmail.com

Abstract

This study aims to describe the pattern of developing village apparatus competence in village asset management, and to explain the constraints to developing village apparatus competence in Village Asset Management. This research was conducted in Pendem Village, Kec. Janapria Kab. Central Lombok and Lingsar Village, Kec. Lingsar Kab. West Lombok. This research uses qualitative research. Furthermore, the data explored include primary and secondary data. The method used to determine the source of data in this study is purposive sampling. Data collection techniques were carried out with observation guidelines, interview guidelines and documentation analysis. Based on the results of the study that (1) Development of Village Apparatus Competence in Village Asset Management, village apparatus competence in managing village assets in both villages, namely 1) Pendem Village Kec. Janapria, Central Lombok Regency; and 2) Lingsar Village, Kec. Lingsar Kab. West Lombok, so far it is still limited to carrying out routines, they still do not have understanding, skills, and interests in the implementation of village asset management; (2) The obstacles faced in developing the competence of village officials in managing village assets, among others, are the busyness of the Village Head who is more focused on things that are considered more important, still lack of data, lack of facilities, lack of budget and lack of cooperation. among village officials.

Keywords: Development, Competence, Village Apparatus, Village Assets

PENDAHULUAN

Saat ini berbicara tentang kompetensi merupakan suatu keharusan bagi setiap lembaga untuk mendapatkan hasil yang diharapkan, baik lembaga pemerintah ataupun swasta, kompetensi menjadi sangat penting karena kompetensi merupakan suatu bentuk kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar memperoleh hasil yang diharapkan. Kompetensi bukan saja dimiliki oleh aparatur pemerintah di tingkat atas akan tetapi sangat penting juga dimiliki oleh aparatur pemerintah di tingkat bawah dalam hal ini Perangkat Desa.

Prof. Dr. Fendy Suhariadi, MT., Psi.
dalam Manajemen Sumber Daya Manusia

menjelaskan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai perilaku, pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang berperan besar dalam kesuksesan melaksanakan suatu pekerjaan, tugas atau peran tertentu. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Disamping kedua hal tersebut, Association K.U. Leuven mendefinisikan kompetensi sebagai pengintegrasian dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memungkinkan untuk melaksanakan satu cara efektif. Sementara menurut Robert A. Roe, mendefinisikan "as the ability to adequately perform a task, duty or role. Competence

integrates knowledge, skill, personal value and attitudes. Competence on knowledge and skill and is acquired through work experience and learning by doing". Dari beragam pandangan tersebut, maka kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan satu tugas, peran atau tugas, kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan.

Untuk meningkatkan kompetensi sebagaimana yang disebutkan diatas bahwa dalam rangka melakukan penelitian tentang pengembangan kompetensi Perangkat Desa dalam pengelolaan asset desa, semata-mata untuk memotivasi para perangkat desa agar memiliki kompetensi berupa kemampuan, pengetahuan/pemahaman, pengalaman, keterampilan serta sikap dan budaya kerja agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Tentu kompetensi menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perangkat desa dalam pengelolaan asset desa, walaupun saat ini asset desa masih menjadi suatu hal yang kurang menarik apabila dibandingkan dengan berbicara tentang Dana Desa (DD) yang digelontorkan pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain Dana Desa (DD) tersebut, terdapat juga Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa, atau bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Akan tetapi disini lain akan menjadi tidak kalah pentingnya apabila asset desa tersebut pengelolaannya dilakukan secara

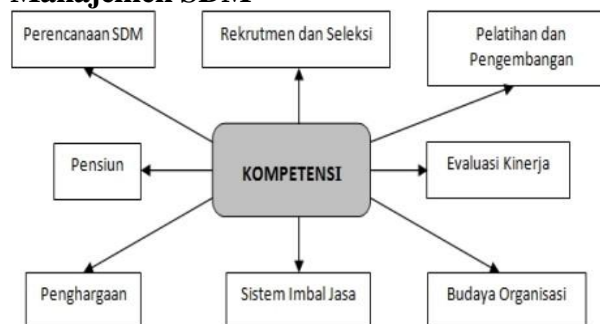
propesional dan tentu dilakukan oleh perangkat desa yang memiliki kompetensi.

Dalam hal ini untuk meningkatkan kompetensi Perangkat Desa tersebut diperlukan komitmen Lembaga penyelenggara Pengembangan Kompetensi yaitu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pusat pengembangan kompetensi ASN maupun Non ASN.

Untuk mencapai hasil yang maksimal dan optimal dibutuhkan kompetensi, kemampuan dan pengetahuan perangkat desa dalam mengelola asset desa dengan melakukan Pengembangan Kompetensi bagi para Perangkat Desa dalam Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berikut ditampilkan gambar integrasi dan pengaruh kompetensi pada proses manajemen sumber daya manusia.

Gambar 1. Integritas Kompetensi dalam Manajemen SDM



Sumber: dokumentasi peneliti, 2021

Merupakan kompetensi yang dimiliki individu memiliki peran penting dalam manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa potensi dan kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia merupakan asset paling

penting dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Selain konsep kompetensi awalnya diungkapkan dalam artikel penelitian oleh David C. McClelland dalam artikel jurnalnya (McClelland, 1973). Selanjutnya, konsep kompetensi terus diteliti dan diaplikasikan hingga berkembang seperti saat ini. Di Indonesia, konsep kompetensi juga mengalami evolusi, mulai dari aplikasi di ranah pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) sektor swasta hingga sektor pemerintah. Konsep kompetensi ini muncul karena kenyataan bahwa tes akademik dan inteligensi tidak mampu menjamin kesuksesan seseorang dalam bekerja, selain itu keduanya juga mengalami bias dikarenakan perbedaan ras, gender, dan status ekonomi (Spencer & Spencer, 1993). Bahkan lebih jauh lagi, McClelland menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak menjamin kesuksesan dalam bekerja (McClelland, 1973).

Kompetensi didefinisikan secara beragam oleh para ahli. Spencer dan Spencer menyatakan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar individu yang mampu memprediksi kinerja terukur yang bersifat efektif dan/atau superior dalam lingkup tempat kerja atau situasi lainnya (Spencer & Spencer, 1993). Selain di lingkup pekerjaan, kompetensi dapat pula diterapkan dalam konteks pendidikan. Akan tetapi, dalam hal ini, pembahasan akan dibatasi pada ranah pekerjaan saja. Kutipan dari Kuijpers dalam sebuah artikel (De Vos, De Hauw, & Willemse, 2015) menyebutkan bahwa ada tiga tipe penting dalam kompetensi, yakni: kompetensi fungsional, belajar, dan karir. Kompetensi fungsional adalah kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik.

Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku di desa disamping memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desa yang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya

yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala Desa (Gunawan, 2013). Perangkat desa dituntut dapat mengelola dan mengembangkan masyarakat dan segala sumber daya yang kita miliki secara baik (Good Governance) yang bercirikan demokratis juga desentralistis (Indrianasari, Neny Tri. 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Selanjutnya data yang ditelusuri meliputi data primer dan sekunder. Metode yang digunakan untuk menentukan sumber data dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang (nara sumber) tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2005;96). Dengan menggunakan metode Purposive Sampling ini maka sumber data dalam penelitian ini adalah Desa yang menjadi lokasi/obyek penelitian (Arsjad, 2018).

Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik mengumpulkan data dengan mempelajari buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Disamping itu pada studi kepustakaan ini Peneliti juga mencari data awal melalui literasi internet yang selanjutnya melakukan pengecekan data untuk memperoleh keyakinan atau validitas data terhadap kebenaran data dengan melakukan triangulasi data riil berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan.

2. Studi lapangan

Studi lapangan merupakan teknik pengumpulan data dan penyeleksian data secara langsung yang diperoleh dari lokasi penelitian. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan dengan cara:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kepada objek penelitian untuk

melihat dari dekat kegiatan yang akan dilakukan. Observasi juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian, peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar selama melakukan observasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data secara langsung dimana pewawancara (peneliti) atau yang bertugas melakukan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai. Wawancara juga bisa digunakan untuk membuktikan informasi atau keterangan yang telah diperoleh sebelumnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rangkaian catatan peristiwa yang sudah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi dapat dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen yang diperlukan terkait topik yang diteliti. Dokumen bisa berbentuk tulisan, surat, arsip foto/gambar, notulen rapat, buku harian, atau karya-karya monumental dari seseorang, dan lain-lain.

Sedangkan tehnik analisis data yang dipergunakan pada penelitian ini sebagaimana dijelaskan bahwa tujuan analisis data ialah untuk mengungkapkan data apa yang masih perlu di cari, hipotesis apa yang perlu diuji, pertanyaan apa yang perlu dijawab, metode apa yang harus digunakan untuk mendapatkan informasi baru, dan kesalahan apa yang harus segera diperbaiki. Menurut Bogdan dan Biklen (1992), analisis data ialah proses pencarian dan penyusunan data yang sistematis melalui transkrip wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi yang secara akumulasi menambah pemahaman peneliti terhadap yang ditemukan. Sedangkan menurut Spradly (1997), analisis data merujuk pengujian sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian-bagiannya, hubungan diantara bagian-bagian, dan hubungan bagian-bagian itu dengan keseluruhan (Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini membahas mengenai hasil penelitian berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini selain melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti sebelumnya juga melakukan pertemuan melalui Focus Group Discussion (FGD) bagi para perangkat desa di 2 (dua) desa yang menjadi lokus/lokasi penelitian yaitu 1). Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan 2). Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, dengan tujuan agar para perangkat desa dapat memberikan informasi dan mengetahui serta menyiapkan data-data terkait penelitian.

Hasil

Pola Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa

a. Desa Pendem Kecamatan Janapria

Desa Pendem Kecamatan Janapria merupakan salah satu desa di Kabupaten Lombok Tengah yang dijadikan sebagai lokus/lokasi penelitian terkait tentang kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan asset desa. Berdasarkan informasi dan Profil Desa Pendem yang peneliti peroleh dari Sekretaris Desa (Sekdes) bahwa Desa Pendem merupakan pemekaran dari Desa Kopang pada tanggal 10 Januari 1968, hanya saja pada saat penelitian tidak dibuktikan dengan surat keputusan pendiriannya.

Pada penelitian yang dilakukan di Desa Pendem Kecamatan Janapria tersebut merupakan desa yang memiliki Perangkat Desa, yang terdiri dari berbagai jenjang Pendidikan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan asset desa dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan

Tabel 1. data jabatan dan Pendidikan Perangkat Desa Pendem

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan	Jenis Kelamin	Ket.
1.	Sirajul Munir	Sekretaris Desa	SLTA	L	-
2.	Affif Afiduddin, S.Pd.	Kasi Pemerintahan	S1	L	-
3.	Murhan, A.Md.	Kasi Kesra	D3	L	-
4.	Abdul Karim, S.Pd	Kasi Pelayanan Umum	S1	L	-
5.	Sri Bayanun	Kaur Keuangan	SLTA	P	-
6.	Heri Fajri, S.Kom	Kaur Perencanaan	S1	L	-
7.	Rina Sriwati, S.Pd.	Kaur Umum	S1	L	-
8.	Mustafa	Kadus Potorok	SLTA	L	-
9.	Safrudin	Kadus Maliklo	SLTA	L	-
10.	Muhdar	Kadus Mogon	SLTA	L	-
11.	H. Sahlan	Kadus Mt. Bila	SLTA	L	-
12.	Syamsul Mujahidin, S.Pd.I	Kadus Gelondong	S1	L	-
13.	Abdussukur	Kadus Kr. Majelo	SLTA	L	-
14.	Sukarman, S.Pd.	Kadus Napek	S1	L	-
15.	Hasanudin	Kadus Dao	SLTA	L	-
16.	Nazarudin	Kadus Penuntut	SLTA	L	-
17.	Hamzan Ahmadi, S.Kom., M.Kom	Kadus Jelitong	S2	L	-
18.	Hasanudin, S.Pd.I	Kadus Sikep	S1	L	-
19.	Nursah	Kadus Lkg. Bangkon	SLTA	L	-
20.	Sukandi	Kadus Jangka	SLTA	L	-
21.	Ramli Ahmad	Kadus Piling	SLTA	L	-
22.	Sahdi	Kadus Pipi	SLTA	L	-
23.	Ahmad Nurul Fajri, S.Pd	Kadus Gelung	S1	L	-
24.	Marwan	Kadus Kuang	SLTA	L	-
25.	Muhammad Sanusi	Kadus Montor	SLTA	L	-
26.	Muhammad Syarkawi	Kadus Pendem Selatan	SLTA	L	-
27.	Rudi Marlil	Kadus Pendem Utara	SLTA	L	-
28.	H.Janoardi	Kadus Dasan Bagek	SLTA	L	-

Sumber: diolah oleh peneliti dari profil Desa Pendem, 2021

Mencermati data sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang dimiliki oleh Desa Pendem saat dilakukan penelitian dapat digambarkan bahwa sumber daya manusia (SDM) saat ini cukup untuk melaksanakan tugas pengelolaan asset desa, akan tetapi masih di perlukan pengembangan kompetensi. Kompetensi tersebut berupa keterampilan (skill) dan pengalaman (understanding) serta minat (interest) dalam pengelolaan asset desa, dengan melakukan pendampingan, asistensi, pelatihan, bimbingan teknis (bimtek), dan Focus Group Discus (FGD) terkait dengan pengelolaan asset desa kepada para perangkat desa.

Pentingnya pengembangan kompetensi bagi perangkat desa menjadi suatu hal yang tidak boleh diabaikan, dengan kata lain bahwa kompetensi perangkat desa dibutuhkan kemampuan, keterampilan dan minat para perangkat desa untuk melaksanakan pengelolaan asset desa.

Pembahasan mengenai hasil penelitian ini merupakan temuan lapangan yang semakin memotivasi peneliti untuk ingin mengetahui lebih detail terkait hasil observasi yang ditemukan, selanjutnya dapat dilakukan proses pengolahan data hasil penelitian agar dipahami sebagai sumber peningkatan ilmu pengetahuan, serta dapat memahami kompetensi bagi para Perangkat Desa. Penelitian ini selain mengobservasi/melakukan pengamatan, wawancara dan dokumentasi, terlebih dahulu

peneliti juga melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang dilakukan di Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi lokus/lokasi penelitian.

Hasil penelitian yang sudah dilakukan akan dituangkan sebagai bagian dalam pembahasan mengenai kompetensi Perangkat Desa dalam mengelola asset desa. Kompetensi menjadi hal yang sangat penting didalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi perangkat desa di Desa Pendem saat ini, apabila dilihat sejak penelitian ini dilaksanakan, maka sudah seharusnya para perangkat desa di bekali dengan kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berupa pemahaman, keterampilan dan minat dalam pengelolaan asset desa agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain kompetensi yang dimiliki perangkat desa juga sudah tersedia sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai perangkat desa diantaranya terdapat ruang kerja dan peralatan perkantoran yang cukup memadai. Kesemuanya itu adalah merupakan fasilitas penunjang bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

b. Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat

Untuk mengetahui informasi dan data pada Penelitian ini, peneliti terlebih dahulu melakukan Focus Group Discussion (FGD) yang diikuti oleh Kepala Desa dan para perangkat desa di Desa Lingsar.

Penelitian yang dilakukan di Desa Lingsar Kecamatan Lingsar merupakan salah satu desa yang sebenarnya memiliki asset desa yang cukup luas untuk dikelola sebagai sumber pendapatan desa untuk kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi aset desa berupa tanah desa yang dimiliki oleh Desa Lingsar tersebut sebagiannya digunakan sebagai lokasi kantor pemerintah, sekolah dan fasilitas umum lainnya seperti; Kantor Camat, Kantor Urusan Agama (KUA), Kantor Posramil Lingsar, Kantor UPT Dikbud, UPT Dinas Pertanian, Lapangan, SMP, dan SMA .

Disamping itu aset desa Lingsar ada yang berada di luar desanya dan berjarak sekitar 5-7km dari kantor desanya, akan tetapi walaupun demikian asset tersebut pengelolaannya di berikan kepada kiyai dusun dan penghulu desa di desa lingsar (*sumber informasi perangkat desa Lingsar Sahabudin dan Sukarmin*).

Kompetensi perangkat desa yang dimiliki kedua desa tersebut yaitu 1) Desa Pendem Kec. Janapria Kab. Lombok Tengah; dan 2) Desa Lingsar Kec. Lingsar Kab. Lombok Barat, akan menjadi hal yang sangat penting didalam melaksanakan tugas dan fungsi bagi perangkat desa di Desa Lingsar saat ini, apabila dilihat sejak penelitian ini dilaksanakan, maka sudah seharusnya para perangkat desa di bekali dengan kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan memiliki pemahaman (*understanding*), keterampilan (*skill*) dan minat (*interest*) dalam pengelolaan asset desa agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Hanya saja ada perbedaan antara Desa Pendem dengan Desa Lingsar, yaitu Desa Lingsar dalam pengelolaan asset desa lebih mengedepankan kearifan local (*Local Wisdom*) dengan menyerahkan pengelolaan asset desa kepada kiyai dusun dan penghulu desa (*sumber perangkat desa Lingsar*).

Sebagaimana halnya Desa Pendem, Desa Lingsar juga selain kompetensi yang dimiliki perangkat desa juga sudah tersedia sarana dan prasarana penunjang dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi sebagai perangkat desa, diantaranya terdapat ruang kerja dan peralatan perkantoran yang cukup memadai. Kesemuanya itu adalah merupakan fasilitas penunjang bagi perangkat desa dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya.

Kendala-kendala Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa

Secara umum pola pengembangan kompetensi perangkat desa di 2 (dua) desa yang menjadi lokus/objek penelitian tersebut belum banyak dilakukan. Permasalahan kompetensi khususnya terkait kompetensi pengelolaan asset desa belum dapat disentuh secara khusus

oleh pemerintah desa bahkan oleh pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah provinsi.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesibukan Kepala Desa yang lebih fokus kepada hal-hal yang dianggap bersifat lebih penting dari pada meminta dan mempertanyakan kelengkapan data terkait dengan perangkat desa yang dimiliki seperti tersedianya format mengenai data kebutuhan kompetensi perangkat desa.
- b. Masih kurangnya data secara lengkap dan masih adanya perangkat desa yang tidak memiliki data-data ketika diminta oleh Kepala Desa.
- c. Kurangnya fasilitas yang dimiliki, ketersediaan waktu untuk menyelenggarakan pendampingan, bimtek dan sejenisnya bagi perangkat desa serta terbatasnya anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan tersebut.
- d. Kurangnya anggaran untuk memberikan penghargaan kepada perangkat desa.
- e. Kurangnya Kerjasama dan tidak tersedianya fakta dan data yang lengkap diantara perangkat desa.

Penjelasan tersebut diatas sebagaimana dikemukakan oleh Notoatmojo (2015: 12-13) bahwa: Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia adalah:

- a. Faktor internal
 1. Misi dan tujuan organisasi
 2. Strategi pencapaian tujuan
 3. Sifat dan jenis kegiatan
 4. Jenis teknologi yang digunakan.
- b. Faktor eksternal
 1. Kebijakan pemerintah
 2. Sosio budaya masyarakat
 3. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kendala dalam menghadapi pengembangan kompetensi

perangkat desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Mendata seluruh aspek yang dimiliki perangkat desa yaitu mengajak dan meminta dengan penuh kesadaran kepada perangkat desa agar menyerahkan data- datanya dan meminta agar dapat meluangkan waktu untuk dilakukan wawancara dan tanya jawab terkait data-data seperti kompetensi, sikap dan kepribadian.
- b. Untuk memiliki data secara lengkap tentang perangkat desa yaitu dengan memberikan pemahaman agar memiliki kesadaran tentang pentingnya data yang diperlukan, menyediakan waktu luang untuk mendata secara keseluruhan serta meminta untuk meluangkan waktu kepada perangkat desa untuk melakukan diskusi terkait data-data kompetensi perangkat desa.
- c. Mengajak dan meminta perangkat desa untuk meluangkan waktunya untuk mengikuti pembimbingan, bimtek dan menyediakan anggaran.
- d. Menyediakan fasilitas, menentukan waktu penyelenggaraan kegiatan, mencari sumber dana dan melakukan komunikasi dengan perangkat desa agar kompetensi dan peningkatan profesionalisme kerja dapat terlaksana.
- e. Melakukan pendekatan dengan komunikasi secara intens dengan seluruh perangkat desa sehingga tercipta kerjasama dan lingkungan kerja yang kondusif sehingga terwujud pemerintahan desa yang profesional.

Maka Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) akan memiliki manfaat baik untuk organisasi maupun untuk anggota organisasi. Manfaat atau faedah pengembangan SDM menurut Kadarisman, (2013: 39-40) menyatakan bahwa: Suatu program pengembangan SDM

pegawai dalam suatu organisasi yang jelas adalah dengan pengembangan pegawai tersebut pegawai lebih mudah melaksanakan tugasnya, sehingga akan lebih positif dalam menyumbang tenaga dan pikiran bagi organisasi.

Upaya mengatasi berbagai kendala dalam pengembangan kompetensi perangkat desa yang dilakukan oleh kedua desa tersebut, antara lain: (1) Memberdayakan perangkat desa yang ada dengan tugas khusus terkait pengelolaan asset desa. (2) Memberikan pendampingan atau mentoring dalam pengelolaan asset desa.

Dengan demikian yang dilakukan dalam pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan kompetensi perangkat desa di 2 (dua) desa tersebut yaitu dengan terus menerus meningkatkan keterampilan (skill) dan pengetahuan (knowledge) serta minat (interest) perangkat desa agar lebih mudah melaksanakan tugasnya dan untuk meningkatkan kapabilitas dalam rangka menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan pemerintahan desa, sehingga profesionalisme kerja perangkat desa di 2 (dua) desa tersebut dapat terwujud.

Pembahasan

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di 2 (dua) desa yang menjadi lokus/lokasi penelitian tersebut dapat di jelaskan bahwa kompetensi perangkat desa di kedua desa tersebut tidak memiliki perbedaan yang menjolok dan signifikan apa bila dilihat dari segi pengetahuan (knowledge), pemahaman (Understanding), keterampilan (skill), nilai (Value), etika (attitude), dan minat (interest), sebagaimana teori yang di gunakan. Pada penelitian ini pengembangan kompetensi yang peneliti pilih/gunakan adalah menurut

teori Jack Gordon (1998) sebagai berikut:

1. Desa Pendem Kec. Janapria

1. Pengetahuan (Knowledge)

Pada pengetahuan (knowledge) yang dimiliki para perangkat desa merupakan salah satu kompetensi yang diperlukan dalam mengembangkan diri untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya seperti :

a. Jenjang pendidikan perangkat desa di Desa Pendem yang dijadikan sebagai lokus/lokasi penelitian tersebut merupakan perangkat desa yang memiliki jenjang pendidikan sampai Strata Dua (S2), Strata satu (S1), Diploma (D3) dan yang paling dominan dengan Pendidikan SMA, artinya pengetahuan yang dimiliki oleh perangkat desa sudah lebih dari cukup untuk melakukan pengelolaan aset desa.

a. Perangkat Desa di Desa Pendem selama ini pernah mengikuti Pelatihan-pelatihan, dan bimtek hanya yang terkait dengan pemerintahan desa dan administrasi kependudukan, akan tetapi belum pernah secara khusus dilakukan pelatihan tentang pengelolaan aset.

b. Belum pernah mengikuti pelatihan maupun bimtek yang terkait khusus tentang pengelolaan aset desa.

2. Pemahaman (Understanding)

Terkait pemahaman para Perangkat Desa di Desa Pendem tentang pengelolaan aset desa masih kurang, walaupun sampai proses penelitian dilakukan, akan tetapi pengelolaan aset desa di Desa Pendem sejak tahun 2020 sudah dilakukan dengan cara sewa dan disetorkan ke kas desa. Pemahaman mengenai pengelolaan

aset desa masih perlu ditingkatkan. (*sumber informasi Sekdes*).

3. Keterampilan (Skill)

a. Keterampilan yang dimiliki oleh perangkat desa di Desa Pendem dalam pengelolaan aset desa belum signifikan walaupun sudah dilakukan pengelolaan aset desa dengan cara sewa, akan tetapi masih dilakukan sebatas dengan kebiasaan dari tahun sebelumnya, belum sepenuhnya mengacu pada peraturan perundang-undangan.

b. Keterampilan para Perangkat Desa di Desa Pendem masih perlu dilakukan dengan cara pendampingan, asistensi, pelatihan ataupun bimtek agar pengelolaan aset desa lebih maksimal dalam memperoleh hasil.

4. Nilai (Value)

Sedangkan value atau nilai yang dimiliki para perangkat desa menjadi suatu yang sangat penting karena nilai merupakan konsekwensi yang harus diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Nilai tersebut dapat dilihat pada kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh perangkat desa. Disamping itu nilai merupakan sifat yang dapat dijadikan sebagai standar perilaku yang harus dimiliki oleh para perangkat desa seperti adanya kejujuran, demokratis dan adanya keterbukaan terhadap sesama di dalam melaksanakan tugas organisasi.

5. Sikap (Attitude)

a. Terkait dengan etika pelayanan publik, sebagaimana yang sering dilakukan yaitu 5.S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun). Kedua desa yaitu Desa Pendem dan Desa Lingsar, yang dijadikan sebagai lokus/lokasi penelitian belum sepenuhnya menerapkan 5.S

tersebut, dan hanya lebih kepada kebiasaan-kebiasaan rutin yang pernah dilakukan sebelumnya.

- b. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh perangkat desa di Kedua Desa tersebut secara berulang-ulang merupakan kecenderungan dan kesengajaan yang tanpa disadari bahwa kebiasaan tersebut berdampak terhadap kualitas pelayanan publik yang tidak meningkat, hanya lebih kepada pelaksanaan pekerjaan yang bersifat rutinitas semata.
- c. Diharapkan setelah penelitian ini sikap (attitude) para perangkat desa akan menjadi perhatian lebih sehingga dapat berdampak kepada pengelolaan aset yang lebih baik.

6. Minat (Interest)

Setelah melakukan penelitian dan mengobservasi data dan fakta di lapangan bahwa adanya kecenderungan untuk bekerja lebih baik, bahwa interest/minat menjadi salah satu perhatian penting bagi peneliti terhadap para perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Desa Lingsar Kec. Lingsar

1. Pengetahuan (Knowledge)

- a. Pendidikan perangkat desa, jenjang pendidikan Perangkat Desa di Desa Lingsar sebagai lokus/lokasi penelitian, memiliki sedikit perbedaan dengan Desa Pendem, akan tetapi berdasarkan ketentuan bahwa batas Pendidikan bagi perangkat desa minimal berpendidikan sekolah lanjutan atas (SMA) sebagaimana yang dimiliki oleh perangkat desa. Perangkat Desa Lingsar berpendidikan mulai dari Strata Satu (S1), Diploma Tiga (D3), dan di dominasi tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagai standar pendidikan

bagi perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Artinya Pendidikan yang dimiliki para perangkat desa di Desa Lingsar sudah cukup dalam melakukan pengelolaan aset desa.

- b. Perangkat Desa Lingsar tidak pernah mengikuti pelatihan ataupun bimtek secara khusus terkait dengan pengelolaan aset desa.
- c. Pelatihan-pelatihan yang pernah diikuti oleh perangkat desa Lingsar seperti; Pelatihan Kader Posyandu; Kader Kesehatan; Anak Nusantara; Pembinaan Kebudayaan; Pencegahan Terorisme; dan Pelatihan Penyuluhan Pertanian. (*sumber informasi Sibawae, Kasie Kesra*).

2. Pemahaman (Understanding)

Pemahaman para Perangkat Desa di Desa Lingsar tentang pengelolaan aset desa masih kurang, walaupun sampai proses penelitian dilakukan bahwa pengelolaan aset desa di Desa Lingsar diberikan kepada kiyai dusun dan penghulu desa, masih perlu untuk diberikan pemahaman mengenai pengelolaan aset desa secara baik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Desa Lingsar lebih melihat kepada sisi kearifan local (local wisdom) dari pada melaksanakan pengelolaan aset desa berdasarkan peraturan.

3. Keterampilan (Skill)

Keterampilan yang harus dimiliki oleh perangkat desa di Desa Lingsar terkait dengan pengelolaan aset desa masih perlu ditingkatkan agar pengelolaan aset desa berjalan sebagai mana yang diharapkan.

4. Nilai (Value)

Kedua desa tersebut, baik Desa Pendem Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah maupun Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat, Value atau nilai yang dimiliki

para perangkat desa menjadi suatu hal yang sangat penting karena nilai merupakan konsekuensi yang harus diperlukan dalam pelaksanaan tugas. Nilai tersebut dapat dilihat pada kejujuran dan integritas yang dimiliki oleh para perangkat desa. Disamping itu nilai dapat dijadikan sebagai standar perilaku yang harus dimiliki oleh para perangkat desa seperti adanya kejujuran, demokratis dan adanya keterbukaan terhadap sesama di dalam melaksanakan tugas organisasi.

5. Attitude (Sikap)

a. Terkait dengan etika pelayanan, sebagaimana yang sering dilakukan yaitu 5.S (salam, senyum, sapa, sopan dan santun), masih perlu ditingkatkan dalam pelayanan publik.

b. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh perangkat desa secara berulang-ulang tanpa disadari bahwa kebiasaan tersebut berdampak kepada pelayanan publik, perlu dilandasi dengan perubahan yang lebih baik bukan hanya melaksanakan rutinitas semata.

6. Interest (Minat)

Setelah melakukan penelitian dan mengobservasi data dan fakta di lapangan bahwa adanya kecenderungan untuk bekerja lebih baik, akan tetapi interest/minat menjadi salah satu perhatian penting bagi peneliti terhadap para perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Minat disamping menjadi motivasi dalam melaksanakan tugas juga sebagai faktor penentu keberhasilan menjalankan roda organisasi.

Sebagaimana penjelasan tersebut diatas dapat dilihat bahwa hasil penelitian di 2 (dua) desa tersebut yaitu: 1) Desa Pendem

Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah; dan 2) Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Selanjutnya peneliti uraikan dan menjelaskan hasil penelitian bahwa, kompetensi perangkat desa tersebut berdasarkan pendapat Jack Gordon (1998) yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Kompetensi Perangkat Desa

N O.	KOMPETENSI	DESA PENDE M	DESA LINGGAR	KETERANGAN
1.	Pemahaman (understanding): a. Peraturan perundang-undangan terkait dengan Pengelolaan Aset Desa b. Peta wilayah desa c. Geografis dan Topografis desa d. Data Aset Desa e. Pelayanan publik	Belum maksimal memahami peraturan. Sudah memiliki peta wilayah. Sudah memiliki geografis dan topografis desa. 8,2ha Masih sebatas waktu yang ditetapkan	Belum maksimal memahami peraturan. Sudah memiliki peta wilayah. Sudah memiliki geografis dan topografis desa. 2.20ha Masih sebatas waktu yang ditetapkan	Kedua desa belum maksimal menjalankan pengelolaan asset desa sesuai peraturan.
3.	Kemampuan (skill): a. Pengalaman dalam pengelolaan asset desa b. Penyelesaian komplik c. Pelayanan publik d. Hubungan kemasyarakatan	Belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan asset desa sesuai peraturan. Musyawarah dan mufakat. Sebatas rutinitas. Berjalan lancar.	Belum memiliki pengalaman dalam pengelolaan asset desa sesuai peraturan. Musyawarah dan mufakat. Sebatas rutinitas. Berjalan lancar.	Kemampuan pengelolaan asset desa di kedua desa belum memiliki pengalaman.

N O.	KOMPETE NSI	DESA PENDE M	DESA LINGSAR	KETERAN GAN
4.	Nilai (value): a. Kearifan local (local wisdom) b. Taat/patuh terhadap awiq-awiq desa c. Gotong royong d. Konflik kepentingan	Pengelolaan aset desa sudah disetorkan melalui rekening kas desa sejak tahun 2020. Tidak ada awig-awig tertulis. Dilaksanakan pada saat pemeliharaan aset desa. Dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.	Pengelolaan aset desa diberikan kepada Kiyai dusun dan penghulu desa. Tidak ada awig-awig tertulis. Dilaksanakan pada saat pemeliharaan aset desa. Dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat.	Kedua desa masih mempertahankan nilai-nilai kearifan local (local wisdom), bila dibandingkan dengan melaksanakan sesuai peraturan.
5.	Sikap (attitude): a. Disiplin b. Integritas c. Anti KKN d. Konflik kepentingan. e. Menjunjung tinggi adat istiadat	Masih perlu ditingkatkan dalam pelayanan masyarakat. Baik. Tidak ada kasus Diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Masih kuat terhadap adat istiadat.	Masih perlu ditingkatkan dalam pelayanan masyarakat. Baik. Tidak ada kasus. Diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Masih kuat terhadap adat istiadat.	Kedua desa masih mempertahankan sikap dan menjunjung tinggi adat istiadat.

N O.	KOMPETE NSI	DESA PENDE M	DESA LINGSAR	KETERAN GAN
6.	Minat (interest) a. Ketertarikan dalam pengelolaan aset desa b. Meningkatkan PADes c. Kesejahteraan Masyarakat Desa d. Meminimalisir konflik e. Pelayanan Publik	Masih perlu ditingkatkan dengan memberikan pemahaman tentang pengelolaan aset desa. Belum maksimal dan masih sebatas keinginan. Ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berusaha menekan konflik dengan musyawarah dan mufakat. Masih perlu ditingkatkan.	Mengedepankan kearifan local (local wisdom). Masih tertarik dengan kearifan local (local wisdom). Ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berusaha menekan konflik dengan musyawarah dan mufakat. Masih perlu ditingkatkan.	Khusus di Desa Lingsar pengelolaan aset desa sampai penelitian ini dilakukan, pengelolaan aset desa masih diberikan kepada kiyai dusun dan penghulu desa sebagai bentuk kearifan local (local wisdom).

Sumber: di olah peneliti, 2021

Dari tabel hasil penelitian diatas bahwa jenis kompetensi yang digunakan oleh peneliti, karena lebih relepan dengan Kompetensi Perangkat Desa di kedua desa tersebut dalam Pengelolaan Aset Desa saat ini.

Selanjutnya hasil penelitian yang peneliti lakukan di kedua desa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengetahuan (knowledge)
Bahwa pengetahuan (knowledge) perangkat desa di 2 (kedua) desa yang dijadikan lokasi/lokus penelitian tersebut meliputi Pendidikan Strata Dua (S.2), Pendidikan Strata Satu (S.1), Pendidikan Diploma Tiga (D.3), Pendidikan SMA, dan Pelatihan/bimtek pengelolaan aset desa, khusus pendidikan Strata Dua (S2) merupakan Sumber Daya Manusia perangkat desa yang dimiliki oleh Desa Pendem, oleh karena itu bila dilihat dari segi Pendidikan dan pengetahuan (knowledge)

merupakan SDM yang sudah cukup untuk melakukan pengelolaan asset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Pemahaman (understanding)

Bahwa pemahaman (understanding) perangkat desa di 2 (kedua) desa yang dijadikan lokasi/lokus penelitian tersebut belum memiliki pengalaman dan belum memahami tata cara pelaksanaan pengelolaan asset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kemampuan (skill)

Bahwa kemampuan (skill) perangkat desa di 2 (kedua) desa yang dijadikan sebagai lokasi/lokus penelitian tersebut belum ada Pengalaman dalam hal pengelolaan asset desa.

4. Nilai (value)

Bahwa nilai (value) perangkat desa di 2 (kedua) desa yang dijadikan sebagai lokasi/lokus penelitian tersebut meliputi kearifan local (local wisdom), taat/patuh terhadap awig-awig, dan gotong royong, merupakan sebuah nilai yang masih dipertahankan sampai saat ini.

5. Sikap (attitude)

Bahwa sikap (attitude) perangkat desa di 2 (kedua) desa tersebut pada prinsipnya sama-sama mengedepankan dan memiliki Kedisiplinan, Integritas, Anti KKN, Konflik kepentingan, Menjunjung tinggi adat istiadat, sebagai suatu langkah dalam melaksanakan pengelolaan asset desa.

6. Minat (interested)

Minat (interested) perangkat desa di 2 (kedua) desa tersebut selama proses penelitian dilakukan terlihat bahwa minat dan semangat serta ketertarikan dalam pengelolaan asset desa sangat tinggi guna meningkatkan PADes,

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola pengembangan kompetensi Perangkat Desa dalam pengelolaan asset desa di kedua desa yaitu: 1) Desa Pendem Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, dan; 2) Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat tersebut belum dilakukan

secara khusus, terkait dengan pengelolaan asset desa. Perangkat Desa sebagai pengelola asset desa masih menggunakan cara-cara terdahulu berdasarkan atas kebiasaan. Selain itu Perangkat Desa juga senantiasa mengedepankan kearifan lokal (local wisdom) dalam pengelolaan asset desa. Kepala Desa selaku Pejabat Pemerintah Desa belum melakukan pengembangan kompetensi kepada Perangkat Desa terkait dengan pengelolaan asset desa. Pengelolaan asset desa masih dilakukan sepenuhnya oleh Perangkat Desa dengan pola lama menurut kebiasaan sebelumnya selama tidak menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat desa.

1. Unit kompetensi Perangkat Desa dalam pengelolaan asset desa yang masih lemah disebabkan pada 3 (tiga) aspek yaitu; pemahaman (Understanding), keterampilan (Skill), dan minat (Interest). Sementara untuk aspek pengetahuan (Knowledge), nilai (value), dan sikap (Attitude) sudah memenuhi standar kualifikasi kompetensi.
2. Kendala Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa dalam pengelolaan asset desa di kedua desa yaitu: 1) Desa Pendem Kecamatan Janapria Kab. Lombok Tengah, dan; 2) Desa Lingsar Kecamatan Lingsar Kab. Lombok Barat tersebut adalah masih kurangnya perhatian Kepala Desa terhadap pengelolaan asset desa. Selain itu Kepala Desa dalam melakukan Pengembangan Kompetensi terhadap Perangkat Desa terkendala oleh keterbatasan anggaran.

Disamping itu juga pola Pengembangan Kompetensi Perangkat Desa dalam pengelolaan asset desa oleh Pemerintah Daerah saat ini belum ada kebijakan khusus tentang pola Pengembangan Kompetensi kepada para Perangkat Desa dalam pengelolaan asset desa.

Saran

Sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan di kedua desa tersebut dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Kepala Desa

Kepala Desa selaku pejabat pemerintah desa dan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa bertanggungjawab terhadap pengelolaan asset desa. Untuk itu Perangkat Desa sebagai pengelola asset desa perlu di tingkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikapnya dalam melaksanakan tugas pengelolaan asset desa melalui pengembangan kompetensi. Hal tersebut akan berdampak terhadap manajemen pengelolaan asset desa yang baik serta dapat menambah pendapatan asli desa (PADes). Selain itu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan asset desa berkewajiban untuk memelihara dan menjaga asset desa secara administrasi maupun praktik.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan pendampingan, asistensi, Focus Group Discussion (FGD), bimbingan teknis (bimtek) dan pelatihan-pelatihan kepada Perangkat Desa dalam pengelolaan asset desa.

3. Kepada BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat

BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dijadikan sebagai mitra baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah desa, instansi terkait pada pemerintah kabupaten/kota, serta DPMPD Dukcapil Provinsi NTB dalam membantu pendampingan pengembangan kompetensi perangkat desa terkait pengelolaan aset desa. Pendampingan dimaksud dapat berupa penyusunan design kurikulum, dan perumusan indikator pengembangan kompetensi pengelolaan aset desa yang dibutuhkan oleh desa.

Selain itu BPSDMD Provinsi NTB dapat mengajukan masukan dan saran kepada pemerintah desa dan pemerintah kabupaten/kota untuk lebih memperhatikan pentingnya kompetensi bagi perangkat desa, terutama terkait dengan pengelolaan aset desa. Aset desa sebagai bagian dari kekayaan negara yang memiliki potensi untuk diberdayakan sehingga menghasilkan pendapatan desa (PADes). Untuk itu pengelolaannya hendaknya dikerjakan oleh perangkat desa yang mumpuni

dan memiliki kompetensi pada bidang tersebut. Bagi Widyaiswara BPSDMD Provinsi NTB dapat melakukan pengembangan profesi kewidyaiswaraannya terutama pengembangan kompetensi sosio kultural dan kompetensi teknis untuk melakukan pengabdian masyarakat di desa. Widyaiswara dapat merancang pola pengembangan kompetensi perangkat desa terkait pengelolaan aset desa melalui pola yang sesuai dengan kondisi desa dan anggaran yang tersedia. Pola yang di pakai dapat berupa pendampingan, coaching, mentoring, distance learning maupun pelatihan secara klasikal dan non klasikal. Widyaiswara juga dapat melakukan kajian lebih lanjut terkait kompetensi lainnya dari perangkat desa dalam memajukan desanya. Hal tersebut merupakan bagian inti dalam tugas kewidyaiswaraan terutama berkaitan dengan unsur pengembangan profesi.

4. Kepada DPMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat

DPMPD Dukcapil Provinsi Nusa Tenggara Barat selaku stake holder pemerintahan desa untuk melakukan koordinasi terkait kompetensi Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan asset desa, dengan mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kompetensi perangkat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Soekanto, Soejono. 1990. Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- [2] Siregar, Doli D. 2004. Manajemen Aset. Jakarta: Satya Graha
- [3] Indrianasari, Neny Tri. 2017. Jurnal Ilmiah Keuangan, Akuntansi dan Pajak
- [4] Arsjad, Muh. Fachri. 2018. Journal of Public Administration Studies. Gorontalo
- [5] Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV Lembaga Administrasi Negara Aceh Besar. 2018. Kajian Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN di Pemerintah Daerah
- [6] Suhariadi, Fendy. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam

- Pendekatan Teoritis Praktis. Airlangga University Press
- [7] Manan, Abdul. 2020. Desa Mengelola Aset Desa “Suatu Terobosan Kepala Desa Meningkatkan PADes”.
- [8] Rosidin, Utang. 2019. Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah. Bandung: Pustaka Setia
- [9] Usman, Husaini. & Akbar, Purnomo Setiady. 2017. Metodologi Penelitian Sosial. edisi ketiga. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- [10] Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I 2018, Penyusunan Pedoman Umum Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional di Instansi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara RI
- [11] Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB. 2016. Membangun Halaman Belakang
- [12] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- [13] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
- [14] Pengertian Kompetensi: Definisi, Jenis-Jenis, dan Manfaat Kompetensi <https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian-kompetensi.html>